

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA BERBASIS
TEACHING FACTORY DALAM MENINGKATKAN DAYA SERAP SISWA**
(Studi Kasus Program Pendidikan Sistem Ganda Berbasis Teaching Factory di SMKN 3 Pamekasan)
Oleh : Tarmudji

1. Latar belakang

Pembangunan suatu Negara banyak ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, karena sumber daya manusia merupakan obyek dan subyek pembangunan. Salah satu cara untuk melakukan pembangunan di bidang sumber daya manusia, melalui pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya lembaga pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dan dinamika pembangunan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan tenaga kerja yang profesional. Untuk memenuhi kondisi tersebut, diperlukan manajemen pendidikan yang profesional dan kebijakan pemerintah untuk memecahkan berbagai problem di bidang pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Persaingan antar negara-negara Asia Tenggara melalui kawasan perdagangan bebas Asean (*Asean Free Trade Area/AFTA*) sejak tahun 2003 dan pasar bebas dunia tahun 2020 akan menimbulkan persaingan ketat baik barang jadi/komoditas maupun jasa. Ini berarti Indonesia harus meningkatkan daya saing baik mutu hasil produksi maupun jasa. Peningkatan daya saing ini dimulai dari penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang merupakan faktor keunggulan menghadapi persaingan dimaksud. Jika kita tidak bisa mengantisipasi persiapan SDM yang berkualitas antara lain, berpendidikan, memiliki keahlian dan keterampilan terutama bagi tenaga kerja dalam jumlah yang memadai, maka Indonesia akan menjadi korban perdagangan bebas. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan SDM pada tingkat menengah yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri atau dunia usaha. SDM dimaksud perlu dipersiapkan baik oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga kerja, dan/atau Departemen Perdagangan maupun oleh swasta melalui KADIN serta oleh masyarakat pengguna jasa. Menghadapi kondisi tersebut di atas, pendidikan menengah kejuruan dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan saat ini yang berhubungan dengan tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan dan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya (BSNP, 2006:11). Semua itu menyebabkan tenaga kerja Indonesia sulit bersaing, bahkan tidak sedikit peluang pekerjaan yang ada di Indonesia sendiri diambil oleh para pekerja asing jika tidak ditangani secara serius. Ditambah kenyataan menunjukkan bahwa manusia telah memanfaatkan teknologi untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, bahkan hampir dalam semua aspek kehidupan, masuknya teknologi baru seringkali menyebabkan gangguan atau munculnya berbagai aspek negatif yang menimbulkan permasalahan sosial baru yang tidak diharapkan. (Hamalik, 2008:93).

Mengantisipasi permasalahan ini maka peningkatan sumber daya manusia harus menjadi prioritas dalam pembangunan terutama menghadapi era globalisasi, sangat dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas agar mampu membuat produk - produk unggulan yang mampu bersaing di pasar bebas. Dalam menghadapi persaingan global yang ketat tersebut diperlukan tenaga terampil yang mampu memproduksi dengan kualitas bersaing dan harga bersaing, jika tidak Indonesia akan kebanjiran dengan produk-produk luar yang murah dan berkualitas sebagai akibatnya perusahaan-perusahaan lokal akan gulung tikar mengalami kebangkrutan. Begitu juga halnya dengan SDM sebagai tenaga kerja yang bekerja pada Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) akan diisi oleh tenaga-tenaga profesional dari luar, implikasinya pada tenaga kerja Indonesia akan mengalami banyak pengangguran.

Kondisi sebagaimana tersebut di atas hanya bisa diatasi dengan pendidikan yang berkualitas dari warga negara Indonesia, warga negara yang terampil yang profesional sebagai tenaga kerja. Melalui sekolah kejuruan diharapkan muncul lulusan-lulusan sekolah kejuruan yang siap bekerja dan siap mengisi DU/DI selain mampu membuka peluang kerja melalui kegiatan wirausaha.

Pada kenyataannya kondisi sebagaimana dijelaskan diatas tidak sesuai dengan harapan pemerintah Indonesia muncul banyak problem yang dialami lulusan sekolah menengah khususnya lulusan sekolah kejuruan. Perihal ketidak terserapan pada dunia usaha/dunia industri ketika mereka sudah menyelesaikan studinya pada sekolah kejuruan (SMK) merupakan problem utama yang dialami pendidikan kejuruan di Indonesia. Problem lulusan sekolah kejuruan yang menganggur setelah mereka lulus dari sekolah kejuruan merupakan masalah yang perlu mendapatkan penanganan yang serius, selain menganggur banyak diantara mereka yang meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Pengangguran tingkat pendidikan menengah tersebut disebabkan banyak hal yang saling mempengaruhi. Hal yang paling utama pengangguran dari lulusan SMK adalah karena ketidak siapan lulusan SMK untuk bekerja karena kompetensi kejuruan mereka tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pihak Industri. Ketidakterserapan lulusan tersebut selain kompetensi yang dimiliki lulusan tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri juga karena kompetensi lulusan ada dibawah standar kompetensi yang dituntut oleh industri.

Kondisi sebagaimana dijelaskan di atas tidak sesuai dengan harapan pemerintah Indonesia, muncul banyak problem yang dialami lulusan sekolah menengah khususnya lulusan sekolah kejuruan. Problem tersebut diakibatkan oleh kondisi internal dan eksternal sekolah. Kondisi internal sekolah sebagai akibat banyak sekolah-sekolah kejuruan yang dalam melaksanakan standar proses pembelajarannya tidak didukung oleh sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan terstandar sebagaimana 8 (delapan) standar yang harus dimiliki oleh sekolah diantaranya adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses, Standar Isi (SI), Standar Pengelolaan, Standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Standar pembiayaan, Standar sarana prasarana, dan Standar evaluasi.

Kondisi eksternal sekolah adalah keterbatasan jumlah Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) yang akan menampung lulusan SMK. Kompetensi lulusan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan DU/DI. Rendahnya kualitas lulusan dan rendahnya daya serap tenaga kerja karena pengaruh rendahnya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat terbatasnya investasi yang membuat banyaknya lulusan sekolah kejuruan yang menganggur setelah mereka lulus dari sekolah kejuruan.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, jumlah pengangguran lulusan SMK ternyata lebih besar jika dibandingkan lulusan SMA, pengangguran tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta menyatakan per Februari 2010 mencatat jumlah pengangguran terbuka berdasarkan riwayat pendidikan yaitu: Diploma I/II/III mencapai 15,71%, Sarjana 14,24%, SMK mencapai 13,81%, SMU 11,9%, SMP 7,55% dan SD ke bawah 3,71% dari 8,59 juta pengangguran. Dalam tiga tahun terakhir, tingkat pengangguran SMK menunjukkan tren meningkat. Pada Agustus 2012 pengangguran tingkat SMK hanya 9,87 %. Setahun kemudian pada Agustus 2013, angkanya melonjak menjadi 11,19 %, dan meningkat lagi menjadi 11,24 % per Agustus 2014. Badan Pusat Statistik (BPS) melansir jumlah pengangguran pada Agustus 2014 sebanyak 7,24 juta jiwa, atau berkurang sebanyak 170.000 jiwa dibanding jumlah pengangguran pada Agustus 2013. Namun, jika dibandingkan dengan data Februari 2014, jumlah pengangguran naik sebanyak 90.000 jiwa. Pada Februari 2016, tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada jenjang pendidikan SMK sebesar 9,84%. Angka tersebut meningkat 0,79% dibandingkan Februari 2015, Tenaga Pengangguran tersebut diantaranya disebabkan banyak tenaga lulusan sekolah kejuruan (SMK) yang kompetensi kejuruan tidak sesuai dengan kompetensi yang diinginkan DU/DI.

Data dari BPS Kabupaten Pamekasan menunjukkan hal yang sama bahwa jumlah pengangguran lulusan SMK jauh lebih besar dibandingkan dengan lulusan SMA. Data lulusan SMK yang bekerja tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel1.1 Data Penduduk berumur 15 keatas yang termasuk angkatan kerja th 2015.

Tingkat Pendidikan	Penduduk yang Bekerja		
	Laki - Laki	perempuan	Jumlah
Tidak/Blum pernah sekolah	19.917	30.834	50.751
Tidak/Blum tamat SD	30.948	33.426	64.374
SD	76.613	63.481	140.091
SLTP/Sederat	33.166	37.110	70.276
SMU/Sederajat	45.115	11.315	56.430
SMK/Sederajat	9.474	2.075	11.549
Diploma I/II/III/Akademi	3.250	2.051	5.311
Universitas	17.456	9.095	26.551
Jumlah	235.946	189.387	425.333

Sumber BPS Kab/Pamekasan

Tabel 1.2 Data Penduduk umur diatas15 Kab.Pamekasan yang bekerja tahun 2017

Tingkat Pendidikan	Penduduk yang Bekerja		
	Laki - Laki	perempuan	Jumlah
SD kebawah	130.286	144.077	274.363
SLTP/Sederat	33.313	18.049	51.362
SMU/Sederajat	38.525	15.277	53.802
SMK/Sederajat	13.184	5.318	18.502
Diploma I/II/III/Akademi	1.480	3.271	4.751
Universitas	29.242	13.246	42.488
Jumlah	246.030	199.238	425.333

Sumber BPS Kab/Pamekasan

Data dari BPS Kabupaten Pamekasan tersebut di atas menunjukkan lulusan SMK /sederajat yang bekerja jauh lebih kecil dari lulusan SMA/sederajat. Mereka rata-rata tidak siap untuk bekerja hal ini sebagai salah satu sebab daya serap lulusan Sekolah Menengah Kujuruan (SMK) ke dunia kerja masih rendah.

Selain masalah rendahnya daya serap tenaga kerja menengah Indonesia, pada tingkat Internasional Indonesia memiliki daya saing dan mutu sumber daya manusia yang cukup rendah diantara negara ASEAN. Development Report tahun 2000 versi *United Nations Development Program* (UNDP) menyebutkan bahwa peringkat mutu sumber daya manusia (*Human Development Index*, HDI) Indonesia berada pada urutan ke 110. Peringkat itu jauh di bawah Filipina (77), Thailand (76), Malaysia (61), Brunei Darussalam (32), Korea Selatan (30), dan Singapura (24). Pada tahun 2002 posisi Indonesia semakin menurun. Data *Human Development Index* (HDI) Indonesia nilainya 0,684 berada pada rangking 110, di bawah Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Pada Tahun 2003 HDI Indonesia semakin memburuk menduduki peringkat 112 di bawah Vietnam (109), Filipina (85), Thailand (74), Brunei Darussalam (31), Korea (30), dan Singapura (28), (Kompas, 10 Juni 2003). Data menunjukkan semakin turunnya posisi daya saing tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk angka *Global Competitiveness Index* (GCI) tahun 2003, Indonesia menempati urutan 53. Sementara itu, Vietnam di urutan 50. Laporan *World Competitiveness Year Book* menempatkan kemampuan pendidikan di Indonesia untuk berkompetisi terus menurun. Menurut Hamid (dalam Soekartawi, 2007) pada tahun 1977 saat awal masa krisis ekonomi, urutan atau ranking pendidikan diIndonesia berada pada urutan 9 kemudian pada tahun 1999 urutan tersebut menurun menjadi urutan 46 dari 47 negara. Pada tahun 2002 ranking kemampuan berkompetisi dari pendidikan di Indonesia menurun lagi ke urutan 47 dari 49 negara yang ada. Data terbaru menurut *The Global Competitiveness Index 2015-2016* yang dirilis oleh *World Economic Forum*, saat ini posisi Indonesia berada pada peringkat 37 dari 140 negara dengan meraih skor 4,52 (*score range 1-7*). Peringkat ini memposisikan Indonesia di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand diwilayah Asia Tenggara seiring dengan pelaksanaan MEA sejak tahun 2015. Kebijakan MEA ini merupakan kerjasama di bidang ekonomi yang telah disepakati oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN untuk

menciptakan pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang adil, dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global di Asia Tenggara. Hal ini dengan jelas menyebutkan akan terjadi kompetisi yang ketat antar negara ASEAN dalam bidang ekonomi dan sumber daya manusia yang profesional. Fenomena MEA secara riil dapat dilihat dari terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional untuk tetap dapat bersaing dan bereksistensi di era MEA. Hasibuan (2003:244), menjelaskan bahwa pengertian sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Pengertian ini menunjukkan bahwa SDM dapat dibentuk oleh beberapa faktor pendukung yang saling bersinergi untuk mewujudkan suatu kompetensi yang profesional yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Demi mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Banyak hal yang dapat diupayakan untuk mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di Indonesia dalam menghadapi era MEA, salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan.

Kondisi rendahnya daya serap lulusan sekolah kejuruan merupakan masalah serius yang berdampak pada masalah sosial hal ini tidak sesuai dengan keinginan pemerintah dalam merencanakan lulusan sekolah kejuruan, harapan pemerintah tersebut adalah bahwa lulusan sekolah kejuruan itu mengisi Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) sebagai tenaga kerja menengah, mereka bisa mandiri dengan cara berwirausaha, membuka peluang kerja dan tujuan lain yang prinsipnya mereka itu dipersiapkan untuk bekerja. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam penjelasan pasal 15, yang berbunyi:

“Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu“.

Ditegaskan pula PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa;

“Pendidikan Menengah Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu”.

Sejalan dengan tujuan tersebut, maka dalam pelaksanaan kurikulum SMK perlu dilakukan identifikasi dan pemilihan materi pengajaran yang relevan dengan dunia kerja. Dalam rangka meningkatkan relevansi antara kurikulum di sekolah dan kebutuhan dunia kerja tersebut maka pemerintah menetapkan kebijakan *Link and Match* melalui penyelenggaraan pendidikan sistem ganda (PSG).

Sejak Pelita VI tahun 1994 pemerintah menetapkan kebijakan *Link and Match* melalui penyelenggaraan pendidikan sistem ganda (PSG). Secara harfiah *link* berarti terkait, menyangkut proses yang terus interaktif, dan *match* berarti cocok, menyangkut hasil harus sesuai atau sepadan, sehingga *link and match* sering diterjemahkan menjadi “terkait dan cocok/sepadan”. Mengacu pada konsep ini, diharapkan terdapat keterkaitan dan kecocokan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, yang mana orientasi pendidikan kejuruan dan pelatihan sumber daya manusia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Untuk itu diperlukan penerapan konsep keterkaitan dan kecocokan (“*link and match*”) dalam berbagai kebijakan dan program-program pendidikan. Beberapa prinsip utama dari konsep tersebut yaitu: (1) sistem pendidikan harus terkait dan sepadan dengan kebutuhan, (2) ada relevansi antara kompetensi lulusan SMK yang akan mengisi dunia kerja dengan kompetensi standar yang dibutuhkan dunia kerja. Sudah menjadi masalah klasik bagi dunia pendidikan SMK di Indonesia pada umumnya, bahwa *link and match* antara output pendidikan SMK dengan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) sebagai pengguna output pendidikan SMK belum tercapai. Diantara kebutuhan tersebut, kebutuhan atau tuntutan dunia kerja/usaha/industri, dirasakan amat mendesak, maka prioritas *link and match* diberikan pada pemenuhan kebutuhan dunia kerja (Wardiman J, 1994:15-16).

Kebijakan *link and match* yang dijalankan melalui program PSG selain menjawab permasalahan rendahnya penyerapan lulusan SMK oleh industri karena ketidak sinkronnya antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK dan kompetensi yang dibutuhkan oleh

industri juga dalam rangka mempersiapkan tenaga terampil menjelang berlakunya era perdagangan bebas APEC pada tahun 2020.

Penerapan PSG di SMK yang diberlakukan sejak tahun ajaran 1993/1994 merupakan bagian dan implementasi konsep *link and match*. Kebijakan program PSG yang perancangan kurikulum, proses pembelajaran, dan penyelenggaraan evaluasinya didesain dan dilaksanakan bersama-sama antara pihak sekolah dan industri, diharapkan dapat dihasilkan lulusan SMK yang mumpuni. Siswa-siswi tidak hanya dibekali pengetahuan-pengetahuan dasar tentang dunia industri, tetapi langsung bersentuhan dengan pengalaman kemampuan praktik di dunia kerja nyata. Pendekatan pendidikan dengan sistem ganda sebagai kajian tak terpisahkan dari kebijakan *link and match* (keterkaitan dan kesepadanan), sangat relevan dengan sekolah kejuruan. Karena salah satu program kejuruan *link* dapat diterjemahkan dengan istilah keterkaitan program-program pendidikan yang memiliki misi jelas kebutuhan di lapangan kerja. *Match* dapat diterjemahkan sebagai kesepadanan. Artinya program pendidikan yang sudah terkait dengan berbagai kepentingan tersebut harus disamakan dengan jumlah tingkat mutu atau nilai yang dituntut atau dipersyaratkan oleh masyarakat termasuk perubahan kepentingan yang selalu terjadi dalam pendidikan. Winarsih, Sri (2012: 8) *Link and match* diartikan sebagai proses pendidikan yang seharusnya sesuai dan terkait langsung dengan kebutuhan pembangunan, sehingga hasilnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan tersebut, baik jumlah, mutu, jenis, maupun waktunya.

Dalam mengimplementasikan program PSG tidak pernah lepas dari penggunaan kurikulum pembelajaran karena kurikulum merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana dijelaskan menurut UU No. 20 Tahun 2003,

“...bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”.

Program PSG merupakan kebijakan pemerintah melalui mendikbud dalam menyelesaikan masalah kompetensi yang dimiliki lulusan SMK dengan DU/DI yang membutuhkan tenaga lulusan SMK. Kebijakan ini tertuang dalam kepmendikbud nomor 323/U/1997. Implementasi kebijakan ini sejak di awal pelaksanaan program PSG yakni tahun pelajaran 1993/1994 dengan menggunakan kurikulum SMK tahun 1993/1994. Latar Belakang Perubahan kurikulum ini terutama didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah dan SK Mendikbud No.0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan dan Pertimbangan lain yang terjadi dalam sektor ketenagakerjaan dan pembangunan, serta kecenderungan.

Jika dilihat perkembangan PSG dari awal diberlakukannya PSG hingga kini mengalami banyak permasalahan yang berkaitan dengan prakerin dan daya serap lulusan. Program PSG di desain dengan tujuan agar lulusan SMK mudah terserap di DU/DI, mampu membuka peluang kerja/berwirausaha dan bukan menjadi beban pemerintah dengan menumpuknya tenaga pengangguran lulusan SMK. Permasalahan yang terjadi dari beberapa penelitian mengungkapkan bahwa implementasi program PSG, kendala yang sering muncul adalah ketidak siapan DU/DI bermitra dengan SMK, Jumlah SMK tidak sebanding dengan jumlah DU/DI yang ada. Semakin banyak SMK, semakin banyak juga keberadaan program keahlian, sedang perkembangan DU/DI relatif lamban. Dengan sedikitnya jumlah DU/DI maka daya tampung untuk menerima siswa prakerin makin terbatas. Hal ini berakibat sulitnya SMK mencari Industri Pasangan (IP) untuk melaksanakan prakerin. Kesulitan inilah yang membuat SMK tidak terkontrol lagi dalam mencari IP, bagi kebanyakan SMK mereka mencari IP sekedar melaksanakan kewajiban yang dituntut oleh kurikulum hal ini berakibat proses implementasi berjalan sesuai tahapan yang dituntut kurikulum namun tidak memberikan hasil yang maksimal. Daya serap lulusan SMK menjadi rendah, siswa akan lebih banyak menganggur atau melanjutkan sekolah untuk mengisi waktu.

Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam dan mengangkat dalam studi kasus, permasalahan yang sering muncul yakni rendahnya daya serap karena banyaknya lulusan yang ingin melanjutkan studi. Banyak faktor yang mempengaruhi daya serap lulusan SMK diantaranya adalah, faktor ekonomi, politik, hukum keamanan, kultur, dan sebagainya termasuk kualitas lulusan dan relevansi pendidikan. Fokus penelitian lebih pada daya serap lulusan dilihat dari faktor kualitas lulusan dan relevansi pendidikan sebagai akibat dari implementasi kebijakan PSG yang tertuang dalam kepmendikbud No. 323/U/1997 tentang penyelenggaraan PSG pada sekolah menengah kejuruan. Implementasi kebijakan sangat menentukan keberhasilan kebijakan, jika implementasi kebijakan dijalankan dengan kepatuhan, dijalankan dengan proses yang benar dan dijalankan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Sebagaimana teori Ripley dan Franklin dalam implementasi kebijakan, bahwa implementasi kebijakan tidak akan membawa hasil jika ada ketidak patuhan implementator dalam mengimplementasikan kebijakan. Begitu juga yang dikatakan Ripley dan Franklin dilihat dari perspektif proses dan hasil, bahwa jika perseptif dilihat dari keberhasilan proses implementasi belum tentu dikatakan berhasil bila dilihat dari hasil implementasi, begitu pula sebaliknya. Kebijakan pendidikan kejuruan dalam rangka *link and match* dengan DU/DI tersebut sebagaimana tertuang dalam Kepmendikbud No. 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yaitu:

“Pendidikan sistem ganda selanjutnya disebut PSG adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah menengah kejuruan dan program penguasaan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional”.

Sesuai dengan kondisi yang diinginkan dan di harapkan oleh pemerintah dalam merencanakan lulusan sekolah kejuruan, harapan pemerintah tersebut adalah bahwa lulusan sekolah kejuruan itu mengisi Dunia Usaha/Dunia Industri sebagai tenaga kerja menengah, mereka bisa mandiri dengan cara berwirausaha, membuka peluang kerja dan tujuan lain yang prinsipnya mereka itu dipersiapkan untuk bekerja. Tujuan tersebut termuat dalam kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 2 tahun 1989 yang selanjutnya diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang sekolah menengah kejuruan dalam penjelasan Pasal 15, yang berbunyi:

“Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”.

Ditegaskan pula pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa:

“Pendidikan Menengah Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu”.

Secara umum pendidikan di SMK bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, sebagaimana diatur dalam kurikulum SMK yang tertuang dalam kepmendikbud Nomor 080/V/1993 tentang kurikulum sekolah menengah kejuruan yang menyatakan :

- a. Menggunakan unit produksi sekolah beroperasi secara profesional sebagai wahana pelatihan kejuruan.
- b. Melaksanakan sebgaiain kelompok mata pelajaran kejuruan di sekolah, dan sebagian lainnya di dunia usaha dan industri.
- c. Melaksanakan kelompok mata pelajaran keahlian kejuruan sepenuhnya di masyarakat dunia usaha dan industri.

Kurikulum SMK menyiapkan mereka sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang terampil, terdidik, memiliki etos kerja profesional, serta mampu mengembangkan diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga diharapkan lulusan SMK dapat lebih berorientasi pada kebutuhan dunia usaha dan industri.

PSG merupakan suatu kombinasi antara penyelenggaraan pembelajaran di sekolah (SMK) dengan penyelenggaraan praktek kerja industri (prakerin) di institusi kerja pasangan (perusahaan: jasa, dagang, industri), secara sinkron dan sistematis, bertujuan menghantarkan peserta didik pada penguasaan kemampuan kerja tertentu, sehingga menjadi lulusan yang berkemampuan relevan seperti yang diharapkan. PSG yang dikenal dengan istilah *dual system* menurut Pakpaham, (1995) dalam Anwar (2006: 48) adalah:

“....Model penyelenggaraan pendidikan kejuruan dimana perencanaan dan pelaksanaan pendidikan diwujudkan dalam bentuk kemitraan antara dunia kerja dengan sekolah, sehingga penyelenggaraan pendidikan berlangsung sebagian di sekolah dan sebagian lagi di DU/DI”.

Dalam penyelenggaraan program PSG tidak bisa dilepaskan dengan tuntutan kurikulum yang berlaku, sejak kebijakan program PSG pertama kali dijalankan yakni tahun ajaran 1993/1994 dengan berpedoman pada UU sisdiknas nomor 2 tahun 1989 hingga penyelenggaraan PSG pada tahun pelajaran 2016/2017 yang berpedoman pada UU sisdiknas nomor 20 tahun 2003, penyelenggaraan PSG mengalami pergantian kurikulum beberapa kali yakni, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 1999, kurikulum 2004, kurikulum 2006, hingga kurikulum 2013.

Masing-masing kurikulum memiliki warna dan ciri khas tersendiri. Warna dan ciri khas tiap kurikulum menunjukkan kurikulum berusaha menghadirkan sosok peserta didik yang paling pas dengan jamannya. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu disemangati oleh keinginan untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan serta mengikuti perkembangan zaman, Kurikulum 1984 menggantikan kurikulum 1976/1977 dimana pada kurikulum 1976/1977 tersebut lulusan sekolah kejuruan dicetak untuk menjadi tenaga siap kerja dan siswa tidak diperkenankan untuk melanjutkan studi pada jenjang lebih tinggi. Pada waktu itu program PSG belum digulirkan oleh pemerintah. Kurikulum 1984 memperbaiki kurikulum 1976/1977 melakukan pengembangan pendidikan kejuruan sebagai langkah awal pengkajian terhadap kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, dimana kurikulum ini dikembangkan bermula melalui kepmendikbud nomor 0289b/U/1985 tentang kurikulum sekolah menengah kejuruan tingkat atas (SMKTA), selanjutnya yang lebih mendasar adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1983 tentang penyederhanaan organisasi kurikulum. Tujuan utama kurikulum SMK 1984 adalah menyiapkan siswa menjadi tenaga siap kerja dengan memberikan peluang yang luas untuk mengembangkan dirinya (memberi peluang kepada siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi), kurikulum 1984 ini merupakan langkah awal terhadap kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Unit Produksi Sekolah (UPJ) sebagai sarana kerjasama sekolah dengan dunia usaha/industri dijadikan tempat praktek guru dan siswa dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya, karena unit produksi dapat dikembangkan secara bisnis menyerupai sebuah usaha/industri yang menghasilkan dana untuk membantu praktek siswa.

Selanjutnya kurikulum 1984 dikembangkan didalam kurikulum 1994 dengan berpedoman pada UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah dan SK Mendikbud No.0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan dan pertimbangan lain yang terjadi dalam sektor ketenagakerjaan dan pembangunan, serta kecenderungan yang akan terjadi di masa depan. Kurikulum 1994 menggunakan pendekatan berbasis kompetensi, pada PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, Bab 1 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi:

“Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu”.

Kemudian Bab II pasal 3 Ayat 2 mengatakan bahwa:

“Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan persiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional”.

Pada kurikulum 1994 ini PSG mulai digulirkan pemerintah, Kerjasama antara SMK dan industri tertuang dalam kebijakan kemendikbud Nomor 0490/1992 tentang kerjasama SMK dengan pihak industri yang isinya mengatur kerjasama antara SMK dan pihak Industri dengan dibentuknya Majelis Sekolah (MS) ditingkat sekolah. Melalui PSG, siswa belajar di 2 tempat, sekolah dan industri. Jadi, pemberlakuan PSG menuntut tanggung jawab bersama antara pihak sekolah dan industrinya. Ada empat tujuan program PSG, ialah:

a. Mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional.

- b. Meningkatkan dan memperkuat keterkaitan dan kesepadanan lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan dunia kerja.
- c. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkualitas profesional.
- d. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

Melalui kurikulum 1994 yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran, strategi pembelajaran *Link and Match* merupakan salah satu kebijakan baru untuk pembangunan pendidikan yang sering diterjemahkan terkait dan sepadan. Kebijakan *Link and Match* mengimplikasikan wawasan sumber daya manusia, wawasan masa depan, wawasan mutu dan wawasan keunggulan, wawasan profesionalisme, wawasan nilai tambah dan wawasan ekonomi dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan kejuruan. Pendekatan penyelenggaraan pendidikan dilakukan dari *supply-driven* menuju *demand-driven*. Pendekatan lama yang bersifat *supply-driven* dilakukan secara sepihak oleh penyelenggaraan pendidikan kejuruan, mulai dari perencanaan, penyusunan kurikulum dan evaluasinya. Pada pendekatan *demand-driven* yang mengharapakan justru pihak dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai lembaga pendidikan berjalur formal sebagai bentuk satuan pendidikan kejuruan senantiasa mengikuti perkembangan pasar dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Sekolah Menengah Kejuruan diharapkan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pada bidang keahliannya serta dapat dikembangkan dan siap memasuki dunia kerja.

Perubahan Kurikulum 1994 dari kurikulum sebelumnya adalah merubah dari *School-based program* dual-based program. Pendekatan pembelajarannya melalui pendekatan berbasis kompetensi (*Competency based training*). Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah kependidikan berbasis ganda dengan melaksanakan program pembelajaran yang dilaksanakan di dua tempat. Teori dan praktek dasar kejuruan dilaksanakan di sekolah, sedangkan keterampilan produktif dilaksanakan di DU/DI dengan prinsip belajar sambil bekerja (*“Learning by doing”*). Dalam menjalankan kurikulum ini wajib dibentuk Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) untuk tingkat Nasional yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud dan ketua umum KADIN pada tanggal 17 Oktober 1994 No.0267a/U/1994 dan No. 84/KU/X/1994. MPKN telah secara efektif menggerakkan berbagai badan organisasi perusahaan dan Asosiasi profesi yang dibawah naungan KADIN, sedang di tingkat sekolah wajib dibentuk MS (Majelis Sekolah) yang tugas nya mencarikan/menentukan Industri Pasangan (IP) yang akan dijadikan tempat prakerin siswa. MS ini selalu bekerja sama dengan SMK dalam berbagai hal untuk melaksanakan program PSG diantaranya adalah ikut menyusun sinkronisasi kurikulum antara materi yang akan diajarkan di industri dan di SMK pada DU/DI yang dijadikan IP, MS juga melakukan pengawasan pada pelaksanaan program PSG bersama-sama SMK.

Selanjutnya pada pengembangan kurikulum edisi 1999 melalui PP 29/1990, pendidikan kejuruan hanya dijelaskan pada tiga tempat. Pasal 1 Ayat 3 menyatakan:

“...pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu”.

Sementara itu, pada Pasal 3 Ayat 2 disebutkan bahwa:

“pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional”.

Pelaksanaan PSG dengan pengembangan kurikulum edisi 1999 ini ternyata menemui berbagai keragaman kendala, antara lain: kendala geografis, kendala kesiapan dan potensi SMK, kendala program SMK yang kurang didukung oleh keberadaan industri di daerah yang bersangkutan, kurang efektifnya guru pembimbing dari sekolah, dan instruktur di industri, sulitnya menjalin kerjasama dengan IP, serta lemahnya manajemen pelatihan di industri. Hal ini bersamaan dengan berlakunya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Strategi penerapan PSG dalam Kurikulum Edisi 1999 yang menggunakan pendekatan

pembelajaran berbasis competency (*Competency Based Training*) dan pendekatan pembelajaran berbasis luas (*Broad Based Competency/BBC*) ternyata kurang berhasil atau boleh dikatakan gagal untuk mengatasi permasalahan pendidikan di SMK sehingga mulai era tahun 2000 kebijakan tentang *link and match* dan model pendidikan sistem ganda tidak populer lagi. Kegagalan yang menonjol karena tidak adanya standarisasi dalam hal kompetensi dan sertifikasi sehingga pengetahuan dan keterampilan siswa ternyata sebagian besar tidak *match* saat melamar pekerjaan, begitu juga sertifikasi yang dikeluarkan oleh badan/lembaga sertifikasi tidak diakui Industri

Selanjutnya dalam perkembangan program PSG ketika diberlakukannya kurikulum 2004 sebagai penyempurnaan dari kurikulum edisi 1999. Salah satu inovasi pada Kurikulum SMK Edisi 1999 adalah pemberlakuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan tanggal 31 Desember 1997, yang memuat komponen-komponen yang diperlukan dalam penyelenggaraan PSG. Perubahan kurikulum tersebut seiring dengan kebijakan ditetapkannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas (sistem pendidikan nasional) yang dijabarkan melalui SK Kepmendikbud sebagaimana tersebut diatas, dijelaskan bahwa:

“ Tujuan pendidikan kejuruan adalah menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di DU/DI sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya. Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam ber*kompetisi*, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya”.

Kurikulum 2004 membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar lulusan SMK memiliki kompetensi untuk mengisi dunia kerja atau mengembangkan diri melalui peningkatan jenjang studi.

Implementasi PSG ketika SMK memberlakukan kurikulum 2004 ini jika dilihat dari hubungan kerjasama antara SMK dan DU/DI, memiliki model yang sama dengan implementasi PSG pada kurikulum sebelumnya hanya saja perbedaan terjadi pada pembelajaran di SMK yang berpedoman pada kurikulum yang harus dijalankan. Berkaitan dengan kurikulum 2004 pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan PBT (*Production Based training*) yakni pendidikan berbasis produksi. Dari sisi proses implementasi, jika kurikulum edisi 1999 penilaian Uji kompetensi dan uji sertifikasi bukan evaluasi wajib namun hanya sebagai materi pilihan artinya siswa bisa lulus Ebtanas tanpa harus mengikuti uji kompetensi atau uji sertifikasi, namun pada kurikulum 2004 uji kompetensi dan sertifikasi merupakan bagian yang wajib dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi PSG, siswa tidak bisa lulus Ujian Akhir jika tidak lulus uji kompetensi dan uji sertifikasi dari IP.

Implementasi PSG pada tahun 2004 yang menggunakan kurikulum 2004 hingga implementasi PSG saat ini yang menggunakan kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP) dan kurikulum 2013, memiliki problem yang sama dalam mengimplementasikan program PSG. Penelitian ini dibuat ketika SMK sebagian menggunakan kurikulum 2006 dan sebagian menggunakan kurikulum 2013.

Implementasi program PSG yang saat ini dilakukan yakni pada tahun ajaran 2016/2017 berpedoman pada kurikulum 2006 (kurikulum KTSP). Pendekatan pembelajaran dilakukan melalui pendekatan PBT (*Production Based Training*) yakni pendekatan pembelajaran berbasis produksi, yakni melalui pembelajaran *Teaching Factor (TEFA) Teaching Produksi*. Program pembelajaran ini merupakan pengembangan dari kegiatan Unit Produksi dan Jasa (UPJ) yang ada pada SMK. Jika pada kegiatan UPJ siswa hanya dilatih ketrampilan dalam memenuhi tuntutan kurikulum untuk mata pelajaran produktif dan memasarkan hasil produksi siswa pada masyarakat maupun pada kelompok usaha masyarakat tanpa mendidik mereka pada suasana kerja dan etos kerja industri maka pembelajaran *teaching factory* menyempurnakan kegiatan UPJ sekolah dengan cara siswa diajarkan bekerja menurut suasana kerja di Industri namun pelaksanaan tetap di sekolah. *Teaching factory* adalah pendidikan yang berorientasi pada dunia industri dengan penekanan pada pendekatan pembelajaran dan didukung oleh kurikulum yang

sesuai dengan situasi kerja di industri. Dunia industri yang merupakan sasaran dari proses dan hasil pembelajaran sekolah menengah kejuruan mempunyai karakter dan nuansa tersendiri, oleh karena itu lembaga pendidikan kejuruan dalam proses pembelajaran harus bisa membuat pendekatan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan keinginan dunia industri. Hal ini juga sesuai dengan misi direktorat pembinaan SMK dalam rangka memberdayakan SMK dalam menciptakan lulusan yang berjiwa wirausaha dan memiliki kompetensi keahlian melalui pengembangan kerjasama dengan industri dan berbagai entitas bisnis yang relevan dalam bentuk pembelajaran *teaching factory*. Program *teaching factory* merupakan perpaduan pembelajaran yang sudah ada, yaitu *Competency Based Training (CBT)* dan *Production Based Training (PBT)*. Pengertiannya bahwa suatu proses keahlian atau keterampilan (*life skill*) dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar/konsumen. Dalam penjelasan singkatnya *teaching factory* adalah pembelajaran berorientasi bisnis dan produksi. Proses penerapan program *teaching factory* adalah dengan memadukan konsep bisnis dan pendidikan kejuruan sesuai dengan kompetensi keahlian yang relevan, misalnya: pada program studi keahlian Tata Busana ataupun Tata Boga melalui kegiatan pembuatan roti ataupun busana yang dibuat dan dikerjakan sendiri oleh peserta didik. Kondisi nyatanya bahwa lembaga pendidikan kejuruan senantiasa berusaha dan bekerja secara optimal dalam memotivasi dan merespon penyaluran alumninya, baik sebagai tenaga kerja yang mengisi lingkup pekerjaan maupun yang membuka lapangan kerja sendiri. Namun karena minimnya informasi akan peluang kerja merupakan kendala dan kenyataan pahit yang harus diterima bagi jajarannya yang berada di daerah jauh dari kegiatan bursa kerja/bisnis. Dengan adanya program *teaching factory* merupakan langkah positif yang ditawarkan melalui kebijakan pemerintah guna mengembangkan jiwa kewirausahaan, dengan harapan tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) mampu menjadi aset daerah dan bukan menjadi beban daerah. Lebih jauh diharapkan melalui program *teaching factory*, nantinya banyak bermunculan calon-calon wirausahawan yang berasal dari lulusan SMK.

No	Kompetensi Keahlian	Lulusan Tahun 2010/2011			Lulusan Tahun 2011/2012			Lulusan Tahun 2012/2013		
		Jml Lulusan	Kerjake DU/DI	melanjutkan	Jml Lulusan	Kerja ke DU/DI	Melanjutkan	Jml	Kerjake DU/DI	melanjutkan
1	A.PERHOTELAN	27	19 %	41 %	44	11 %	41 %	68	35 %	53 %
2	TATA BOGA	31	19 %	35 %	53	22 %	34 %	49	24 %	55 %
3	TATA BUSANA	114	11 %	19 %	60	42 %	47 %	114	13 %	25 %
4	RPL	66	12 %	53 %	148	19 %	30 %	66	12 %	58%
5	MUTI MEDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	T.KECANTIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber SMKN 3 Pamekasan

Pada tabel di atas yang tidak terlacak oleh BKK (Biro Kerja Khusus) yang menangani lulusan, adalah mereka yang tidak bekerja/menganggur atau berwirausaha.

Dengan mengimplementasikan program penyelenggaraan PSG melalui berbagai penyempurnaan kurikulum mulai kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 1999, kurikulum edisi 1999, kurikulum 2004, kurikulum 2006 hingga kurikulum 2013, yang dimulai pada tahun ajaran 1993/1994 hingga tahun pelajaran 2012/2013, ternyata tidak membawa hasil maksimal sebagaimana keinginan pemerintah. Keinginan pemerintah dalam membuat kebijakan program PSG adalah keterserapan lulusan SMK di industri, mampu membuka peluang kerja sehingga mampu menekan pengangguran tenaga kerja tingkat menengah. Namun yang terjadi dari kurikulum ke kurikulum implementasi PSG tidak mendapatkan hasil maksimal, yang terjadi justru banyak lulusan SMK yang melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi. DU/DI masih merasa kesulitan menerima lulusan SMK karena kompetensinya yang dibawah standar DU/DI dan kurangnya relevansi antara kompetensi yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan DU/DI. Daya serap lulusan SMK pada dunia kerja masih relatif rendah dibandingkan yang melanjutkan studi sebagaimana terlihat pada tabel atas

Implementasi PSG berbasis *teaching factory* sebagai pengembangan UPJ sekolah yang merupakan pendekatan pembelajaran berbasis produktip diharapkan mampu memberikan hasil maksimal terhadap daya serap siswa ternyata kondisi dilapangan tidak menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Pada data penelitian pendahuluan yang didapat dari lokus penelitian yakni SMKN 3 Pamekasan diperoleh data bahwa pada 3 tahun terakhir lulusan SMKN 3 Pamekasan, siswa lebih banyak melanjutkan studi dari pada diserap pada dunia kerja. Pada tabel 1.4 di bawah ini ditunjukkan kondisi daya serap siswa lulusan SMKN 3 Pamekasan pada 3 tahun terakhir.

Tabel.1.4 Daya serap lulusan SMKN 3 Pamekasan 3 tahun terakhir setelah penerapan *teaching factory*

No	Kompetensi Keahlian	Lulusan Tahun 2014/2015			Lulusan Tahun 2015/2016			Lulusan Tahun 2016/2017		
		Jml lulusan	Bekerja Ke DU/DI	Melanjutkan	Jml lulusan	Bekerja Ke DU/DI	Melanjutkan	Jml lulusan	Bekerja Ke DU/DI	Melanjutkan
1	A.PERHOTELAN	54	39 %	44%	45	4 %	51%	70	12%	4 %
2	TATA BOGA	37	11%	27%	38	29%	53%	61	7%	21%
3	TATA BUSANA	96	7%	45%	69	38%	41%	34	9%	65%
4	RPL	105	11%	74%	99	19%	67%	144	8%	51%
5	MUTI MEDIA	0	0	0	37	5%	81%	144	10%	42%
6	T.KECANTIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : BKK SMKN 3 Pamekasan

Kondisi seperti dalam tabel diatas menunjukkan bahwa hasil implementasi program PSG menggunakan pembelajaran *teaching factory* dan kurikulum yang sedang berlaku (2006) memiliki kecenderungan yang sama dengan penelitian implementasi PSG yang menggunakan kurikulum sebelumnya yakni daya serap lulusan relatif rendah dibandingkan siswa yang melanjutkan studi. Hal ini tidak sesuai dengan harapan pemerintah yang menerapkan kebijakan program PSG dengan tujuan agar lulusan SMK terserap pada dunia kerja, membuka peluang kerja tidak mendapatkan hasil yang maksimal jika tidak mau disebut sebuah kegagalan. Ada hal menarik yang perlu mendapatkan jawaban dari hasil penyerapan siswa sebagaimana tersebut di atas diantaranya adalah apakah implementasi kebijakan program PSG sudah dijalankan dengan benar sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam kepmendikbud nomor 323/U/1997 tentang penyelenggaraan PSG di SMK ?

Implementasi PSG yang menggunakan *teaching factory* sebagai basis meningkatkan kompetensi siswa seharusnya memberikan hasil sebagaimana harapan pemerintah, mengingat siswa diberi bekal ketrampilan yang cukup sebelum melaksanakan prakerin. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah melalui kebijakan PSG dan *teaching factory* yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa lulusan SMK dapat segera terserap oleh dunia kerja. Program PSG ini bila diperhatikan merupakan bentuk strategi promosi siswa melalui pendekatan terhadap DU/DI sebagai mitra sekolah. Dengan pendekatan tersebut diharapkan pihak DU/DI tertarik dengan kompetensi lulusan siswa kejuruan tersebut, dengan demikian diharapkan pihak DU/DI dapat menyerap lulusan SMK untuk menjadi karyawan di tempat usahanya .

Namun demikian kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang didalamnya terkandung keinginan untuk meningkatkan kompetensi lulusan sesuai dengan kompetensi kejuruan yang dibutuhkan oleh pihak DU/DI dan merupakan bentuk strategi promosi lulusan melalui pendekatan terhadap DU/DI selaku pengguna tenaga kerja tersebut tidak akan membawa hasil jika implementasi kebijakan tersebut tidak dijalankan dengan benar, dengan proses yang benar sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan dan dengan kepatuhan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diatur oleh pembuat kebijakan. Banyak teori tentang implementasi kebijakan yang menjelaskan tentang hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan namun teori implementasi kebijakan Model Ripley dan Franklin lebih sesuai dalam melihat implementasi program PSG dan *teaching factory* yang dijalankan oleh

sekolah. Menurut Ripley dan Franklin tiga cara yang dominan untuk mengetahui keberhasilan suatu implementasi seperti diungkapkan Ripley dan Franklin, dalam Amri Yousa (2007:82), yaitu:

1. Keberhasilan suatu implementasi, seharusnya diukur dari tingkat kepatuhan (*compliance*). Perspektif kepatuhan ini semata-mata hanya membicarakan masalah-masalah perilaku birokrasi yang diatur dalam undang-undang ;
2. Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi;
3. Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi dan dampaknya yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki.

Pendapat Ripley dan Franklin di atas menunjukkan bahwa keberhasilan suatu implementasi akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan implementator, lancarnya rutinitas fungsi lembaga/kelancaran proses implementasi, dan hasil/dampak dari program yang sesuai dengan rencana program. Bila dilihat dari ketentuan di atas, maka ketiga faktor tersebut sebenarnya dapat juga dipandang sebagai salah satu alat untuk mengevaluasi terhadap implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan program PSG yang dilakukan dengan benar di harapkan tujuan program PSG dan *teaching factory* akan terwujud. Keberhasilan implementasi akan meningkatkan daya serap lulusan SMK pada dunia kerja sesuai tujuan kebijakan pemerintah melalui Kemendikbud yang tertuang dalam kepmendikbud nomor 323/U/1997 tentang penyelenggaraan PSG, dampak lain adalah terjadi pengurangan pengangguran tenaga menengah.

Berdasarkan tentang apa yang dijelaskan di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program PSG dan *teaching factory* yang ada di SMKN 3 Pamekasan tersebut dijalankan. Disamping untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah tersebut membawa implikasi terhadap daya serap lulusan. Penelitian tersebut merupakan studi kasus terhadap implementasi program kegiatan PSG dan *teaching factory* di SMKN 3 Pamekasan mengingat SMK tersebut dari sisi layanan pendidikan cukup baik karena sekolah tersebut pernah dijadikan SMK RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional),

1.2 Rumusan Masalah

Dari berbagai fenomena dan kondisi sebagaimana dalam latar belakang di atas, permasalahan dalam disertasi ini di rumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi kebijakan Program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) berbasis *teaching factory* di SMK Negeri 3 Kabupaten Pamekasan.
2. Bagaimanakah tingkat penyerapan lulusan SMKN 3 Pamekasan melalui implementasi program Pendidikan Sistem Ganda berbasis *teaching factory*.
3. Bagaimanakah dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendidikan dalam mengimplementasikan program Pendidikan Sistem Ganda berbasis *teaching factory* dalam rangka meningkatkan daya serap lulusan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis implementasi program Pendidikan Sistem Ganda berbasis *teaching factory* di SMKN 3 Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tingkat keterserapan lulusan siswa SMKN 3 Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui, memahami menganalisis dukungan sumber daya, sarana prasarana dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan program Pendidikan Sistem Ganda berbasis *teaching factory* dalam meningkatkan daya serap lulusan siswa SMKN 3 Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritik dan manfaat secara praktis.

1. Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: (a) pengembangan wawasan dan pengembangan teori Pendidikan Sistem Ganda berbasis Teaching Factory di lembaga pendidikan kejuruan; dan (b) untuk dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti Sistem Pembelajaran yang akan datang.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: (a) membantu usaha pemerintah dalam menemukan berbagai masalah yang dihadapi dan usaha membangun manusia berkualitas melalui layanan Pendidikan Sistem Ganda berbasis teaching factory; (b) dapat memberi masukan kepada SMKN 3 Kabupaten Pamekasan dalam penerapan program Pembelajaran berbasis produksi, meningkatkan daya serap lulusan dan meningkatkan mutu lulusan serta membangun reputasi pendidikan.

2. Kajian Teori

Hasbullah tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul :
 “IMPLEMENTASI PABRIK PENGAJARAN (*TEACHING FACTORY*) UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI SISWA SMK”

Penelitian ini membahas tentang Implementasi program pembelajaran *teaching factory* (TEFA) dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa SMK. Penelitian yang di sampaikan dalam seminar Internasional ini difokus kan pada pelaksanaan *teaching factory* di SMK sebagai suatu pendekatan pembelajaran berbasis produksi dimana pada model ini dukungan mutu pendidikan dan latihan yang berorientasi hubungan sekolah dengan dunia industri dan dunia usaha (DU/DI) menerapkan unit produksi di sekolah. Pendekatan pembelajaran dengan TEFA ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi siswa mata diklat tertentu oleh karena itu. Dalam penelitian ini merekomendasikan 1. Pendekatan pembelajaran dengan TEFA tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan industri dan *profit oriented* tetapi dalam implementasinya model ini tidak melupakan unsur pendidikan dan pembelajaran. 2. Pengelola manajemen siswa harus lebih banyak melakukan pelatihan dan pembelajaran secara khusus agar kemampuan dan sumber daya meningkat. 3. Perlu adanya pembelajaran kepada siswa tentang wawasan kewirausahaan, sehingga ketika mereka lulus tidak hanya sekedar mencari pekerjaan tetapi bagaimana mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. 4. Proses pendekatan pembelajaran TEFA ini, guru yang memiliki peran sebagai konsultan dan siswa sebagai pengelola unit produksi kecil harus sinergi dan selaras agar kemampuan hasil produknya lebih berkualitas. 5. Keterlibatan pihak sekolah (fasilitator) dalam membangun jaringan ke dunia industri sehingga dapat lebih aktif mencari order atau pesanan kedalam unit produksi sekolah.

Lilis Juliyanti tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul:
 “PERAN DUDI DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN SISTEM GANDA DI SMK NEGERI 1 SALATIGA”

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) dalam implementasi program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dengan lokasi penelitian SMKN 1 Salatiga. Secara lengkap penelitian ini untuk mengetahui implementasi Pendidikan Sistem Ganda di SMK Negeri 1 Salatiga yang bertujuan: (1) Menggambarkan peran DUDI dalam implementasi Pendidikan Sistem Ganda di SMK Negeri 1 Salatiga, (2) menggambarkan peran DUDI dalam pelaksanaan Praktik Kerja Industri Siswa SMK Negeri I Salatiga, dan (3) mengetahui Persepsi DU/DI terhadap pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran/Partisipasi DUDI selama ini masih terbatas pada kesediaan menerima siswa praktik, belum terlibat secara aktif dalam perencanaan/persiapan dan pengambilan keputusan menyangkut konsep dan prakarsa demi peningkatan penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda maupun Praktik Kerja Industri (Prakerin). Dalam peningkatan kompetensi kualitas siswa dan mutu pendidikan kejuruan serta implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMK Negeri 1 Salatiga, DU/DI mempunyai peran dalam beberapa tahapan sebagai berikut: (1) perencanaan/persiapan, (2) pelaksanaan, dan (3) monitoring dan evaluasi. Secara garis besar saran atau rekomendasi guna mengoptimalkan

peran DU/DI adalah sebagai berikut: (1) perlunya rekonstruksi pola kemitraan antara sekolah (SMK N 1 Salatiga) dengan institusi pasangan (baik dari instansi pemerintah maupun swasta) dalam menjalin kerjasama, sehingga pihak institusi pasangan (IP) ,DU/DI dapat berperan lebih banyak di setiap proses penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda, maupun implementasinya dalam setiap tahapan pelaksanaan Praktik Kerja Industri:(2) perlunya pemberian kewenangan atau melibatkan DU/DI dalam proses uji kompetensi dan sertifikasi, mengingat selama ini DU/DI tidak dilibatkan dalam uji kompetensi dan sertifikasi. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan siswa yang berkualitas dan memenuhi tuntutan pasar kerja

Wahyu Nurharjadm pada tahun 2008 melakukan penelitian dengan judul: “ EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA DI SEKOLAH KEJURUAN “

Penelitian ini merupakan penelitian yang didesain dalam bentuk penelitian evaluasi implementasi Program PSG dimana hasilnya akan diuraikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di SMK Negeri II Klaten. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa SMK Negeri II Klaten merupakan sekolah kejuruan negeri yang paling dianggap berhasil oleh sebagian besar masyarakat. Data primer dikumpulkan dari informan/narasumber yang ada baik di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Klaten (SUBDIN DIKMENJUR), di SMK Negeri seperti kepala Sekolah, Dewan Guru, Komite sekolah, siswa dan juga pada pihak perusahaan/ industri sebagai partner kerjanya. Sementara itu data sekunder diperoleh dengan melihat arsip, dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan PSG, keadaan sekolah dan sebagainya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan/ observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif, peneliti menggunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman (1988). Selanjutnya untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber guna menguji keabsahan datanya. Dari hasil penelitian diperoleh 1. Implementasi Program Pendidikan Sistem Ganda Program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMK Negeri 2 Klaten dilaksanakan mengacu pada Menteri Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda Pada Sekolah Menengah Kejuruan. Adapun pelaksanaannya dimulai pada tahun ajaran 1998/1999. Program PSG pada dasarnya merupakan program pendidikan yang dilakukan di dua tempat yaitu di sekolah khususnya untuk penguasaan teori dan di tempat-tempat usaha/ industri terutama sebagai institusi pasangan untuk keperluan praktek kerja siswa. Di dua tempat tersebut diberikan penilaian baik oleh guru maupun instruktur yang mengajar praktek di Institusi pasangannya. Program PSG ini meliputi teori kejuruan, praktek dasar dan praktek kerja industri. Untuk teori kejuruan dan praktek dasar dilakukan di Sekolah, sedangkan untuk praktek kerja industri diselenggarakan di Institusi pasangannya. Untuk pelaksanaannya ditentukan bahwa siswa selama tiga tahun pertama memperoleh pendidikan di sekolah dan baru pada tahun ke empat maka siswa memperoleh pendidikan dan latihan di institusi pasangannya. Dalam hal pelaksanaannya, berbagai tahapan dilakukan oleh pihak sekolah, antara lain adalah: a. Penyusunan POKJA PSG Penyusunan POKJA PSG di bawah koordinasi Wakil Kepala sekolah bidang Unit Produksi dan Humas Industri (UPHI). Dalam rangka pembentukan POKJA telah berhasil dibentuk 3 buah Pokja yaitu: 1. Pokja PSG 2. Pokja BKK Humas Industri 3. Pokja Unit Produksi Pokja PSG, yaitu Pokja yang memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan PSG. Pokja ini yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program PSG. Pokja ini berkewajiban melakukan sosialisasi tentang program PSG, menentukan institusi pasangan hingga mengirimkan siswa untuk praktek kerja industri. Pokja ini bersama dengan Pokja BKK Humas Industri mempersiapkan berbagai instrumen guna menjalin kerjasama dengan institusi pasangan/ dunia usaha.

Nyoman Ardika pada tahun 2011 telah melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA (PSG) PADA SMK NEGERI 2 SERIRIT”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan program pendidikan sistem ganda (PSG) SMK Negeri 2 Seririt, pada komponen: Konteks, Input, Proses, dan Produk. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan Ex Post Facto dan penelitian ini adalah penelitian evaluatif bersifat deskriptif kuantitatif menggunakan model CIPP dari Stufflebeam. Penelitian ini dilakukan pada sekolah SMK Negeri 2 Seririt pada tahun ajaran 2010/2011, melibatkan 35 responden dengan menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dikuatkan dengan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Kuesioner, digunakan untuk mengumpulkan data konteks, input, proses dan produk. Pengolahan data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara melakukan analisis data kualitatif dan kuantitatif, serta melakukan analisis data untuk memperoleh makna mendalam dibalik angka-angka secara kuantitatif. Analisis data untuk komponen konteks, input, proses dan produk dilakukan dengan menggunakan rumus T-Skor dan dimasukkan ke kuadran Glickman. Hasil analisis data masing-masing variabel yang diteliti: (1) variabel konteks sangat efektif rata-rata skor-T 65,71 (2) Variabel input efektif rata-rata skor-T 54,29, (3) variabel proses sangat efektif dengan rata-rata skor-T 65,71, dan (4) variabel produk sangat efektif dengan rata-rata skor-T 62,86. Setelah diinterpretasikan dalam kuadran Glickman, efektifitas pelaksanaan pendidikan sistem ganda pada SMK N 2 Seririt Sangat efektif.

Septianjar Gunawan tahun 2015 “Pelaksanaan *Teaching Factory* dan Factor – faktor Penghambat Serta Pendukung *Teaching Factory* di Program Study Keahlian Teknik Audio Video SMK negeri 3 Yogyakarta “

Penelitian ini adalah penelitian diskriptip dimana tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor – faktor penghambat dan pendukung kegiatan *teaching factory* pada program keahlian Teknik audio Video di SMKN 3 Yogyakarta . Hasil penelitian diketahui bahwa: (1) pelaksanaan *teaching factory* berawal dari pembentukan struktur manajemen dan kerjasama dengan industri. Standar kompetensi yang digunakan merupakan aplikasi dari kurikulum sekolah. Melibatkan siswa yang menguasai kompetensi kejuruan dan memiliki minat atau bakat. Media pembelajaran yang berupa produk telah disesuaikan dengan kompetensi. Pengajar yang terlibat memiliki kualifikasi akademis, pengalaman di industri, dan komitmen. Penggunaan perlengkapan dan peralatan sudah mampu untuk melaksanakan *teaching factory*, terutama produksi yang kondisinya sama dengan di industri. Produk hasil produksi dipasarkan ke konsumen dan kemudian dilakukan evaluasi pelaksanaan *teaching factory* oleh sekolah dan perusahaan; (2) faktor penghambat *teaching factory* yaitu modal yang belum mencukupi untuk melaksanakan *teaching factory* secara mandiri; (3) faktor pendukung *teaching factory* yaitu produk yang unggul, sumber daya manusia yang berkompeten, bahan baku yang mudah diperoleh, sarana dan prasarana yang mendukung, strategi kerja yang dapat disesuaikan dengan kondisi, pemasaran yang baik, dan lokasi yang mencukupi untuk melaksanakan produksi . rata-rata peneliti tersebut meneliti tentang evaluasi Program PSG di SMK dan Teaching factory ditinjau dari pengaruh yang dihasilkan dari proses pembelajaran dengan program pembelajaran baik PSG maupun *teaching factory*. Para peneliti tersebut tidak membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan aturan yang dijadikan rujukan ataupun landasan hukum pelaksanaan PSG di SMK serta dampak yang terjadi bila aturan tersebut tidak murni diterapkan sebagai dasar rujukan pelaksanaan program PSG. Begitu juga dengan pembelajaran *teaching factory* belum ada yang meneliti pengaruh pembelajaran *teaching factory* yang merupakan bentuk pembelajaran pabrik yang dilaksanakan disekolah terhadap kualitas lulusan maupun pengaruh terhadap daya serap lulusan jika program teaching factory tersebut diterapkan di sekolah. Untuk itulah peneliti melakukan penelitian tentang hal tersebut dalam bentuk melihat bagaimana

implementasi program PSG berbasis *teaching factory* diterapkan di SMK dalam hal ini pada sekolah yang telah menerapkan pembelajaran *teaching factory* yakni di SMKN 3 Pamekasan yang peneliti jadikan sebagai lokus penelitian, dengan harapan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana sekolah melaksanakan kebijakan program PSG yang aturan penyelenggaraannya sudah diatur melalui Kepmendikbud nomor 323/U/1997.

3. Metoda Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metoda kualitatif dengan pendekatan studi kasus, peneliti beralasan bahwa SMKN 3 sebagai objek penelitian memiliki fenomena unik dibandingkan dengan SMK lain baik SMK Negeri maupun SMK swasta yang ada di Pamekasan. Keunikannya meliputi bahwa guru-guru di SMKN 3 Pamekasan mayoritas adalah wanita mengingat sekolah kejuruan tersebut sebelum berubah nama menjadi SMKN 3 Pamekasan adalah SMKK (Sekolah Menengah Kejuruan Keputrian). Selain itu kualitas guru – guru di sekolah tersebut rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan SMKN negeri yang lain baik guru-guru di SMKN 1 maupun di SMKN 2 Pamekasan bila ditinjau dari latar belakang pendidikannya, mengingat SMKN 3 pernah menjadi SMK RSBI sejak Tahun ajaran 2008/2009 hingga ditutupnya program RSBI pada tahun ajaran 2012/2013. Sebagian besar guru-guru disekolah tersebut adalah lulusan S1 dan S2 dan rata-rata adalah alumni siswa di SMK itu sendiri yang mendapatkan kesempatan belajar dari beasiswa pemerintah untuk melanjutkan pendidikan S1. Begitu juga kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan *teaching factory* dan kegiatan Unit Produksi dan jasa (UPJ) cukup maju pesat dibuktikan dengan adanya unit kegiatan produksi roti, minuman, restoran, busana dan jasa perhotelan dengan jumlah kamar sebanyak 19 kamar yang dikelola secara profesional. Ditinjau dari penyerapan lulusan di DU/DI ternyata lulusan SMKN 3 banyak yang tidak terserap di DUDI, hal ini lah yang menjadi dasar peneliti melakukan penelitian dengan metoda kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Studi kasus dalam bentuk observasi, mengutamakan teknik pengumpulan datanya melalui observasi peran-serta atau pelibatan (*participant observation*), sedangkan fokus studinya pada suatu organisasi tertentu dalam hal ini adalah lembaga pendidikan SMKN 3 Pamekasan. Bagian-bagian organisasi yang menjadi fokus studinya antara lain: (a) Unit kelembagaan yang menangani kegiatan PSG; (b) Unit kelembagaan yang menangani kegiatan *teaching factory*; (c) Unit kegiatan yang menangani Unit Produksi dan jasa (UPJ); (d) Unit kelembagaan yang menangani Humas; (e) Unit Kelembagaan yang menangani kurikulum; (f) Unit kelembagaan yang menangani pemasaran lulusan (BKK); (g) Unit kelembagaan yang menangani administrasi sekolah (TU); (h) Unit pimpinan kelembagaan (Kepala Sekolah); (i) Unit kemitraan sekolah (komite sekolah/Majelis Sekolah). Beberapa aspek studi kasus yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- (1) Menentukan "kasus" untuk penelitian, keseluruhan setting atau lokasi penelitian dan respons terhadap potensi pemasaran lulusan siswa SMKN 3 Pamekasan pada DU/DI tempat siswa/siswi melakukan prakerin.
- (2) Kasus ini adalah sebuah "sistem terikat" terikat oleh waktu (kumpulan data enam bulan) dan tempat (sebuah pemasaran lulusan siswa/siswi SMKN 3 Pamekasan pada DU/DI).
- (3) Menggunakan sumber informasi yang banyak dan luas dalam pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran detail dari implementasi kebijakan program PSG berbasis *teaching factory* di SMKN 3 Pamekasan.
- (4) Menggunakan banyak waktu untuk menjelaskan konteks atau setting kasus, pengimplementasian kebijakan tentang program PSG berbasis *teaching factory* di SMKN 3 Pamekasan

4. Paparan Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan program PSG di SMKN 3 Pamekasan dari hasil observasi, berdasarkan dokumentasi yang ada dan wawancara dengan kepala sekolah dan ketua pokja PSG dimana pokja PSG yang ada di SMKN 3 Pamekasan ini dalam bentuk panitia prakerin, diperoleh data bahwa implementasi program PSG didukung oleh SDM yang berasal dari internal sekolah dan eksternal sekolah. SDM dari internal sekolah adalah; (a) kepala sekolah, (b) seluruh staf pimpinan, (c) Ketua program keahlian, (d) Ketua – ketua UPJ sekolah dan (e) guru – guru yang ditunjuk sesuai dengan SK yang dibuat oleh kepala sekolah. Susunan kepanitiaan prakerin sebagaimana tercantum dalam lampiran SK kepala sekolah, secara lengkap susunan kepanitiaan prakerin tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan prakerin begitu juga tugas pokok dan fungsi SDM yang tercantum dalam kepanitiaan prakerin tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan prakerin. SDM yang mendukung implementasi program PSG di SMKN 3 Pamekasan juga berasal dari eksternal sekolah, mereka adalah; (a) orang tua siswa, (b) komite sekolah, (c) stakeholder, (d) pimpinan DU/DI yang menjadi Industri Pasangan (IP) SMKN 3 Pamekasan.

SDM yang terlibat dalam kegiatan implementasi program PSG melaksanakan tugas mulai membuat perencanaan, membuat jadwal kegiatan, melakukan sosialisasi program, melakukan peninjauan industri tempat prakerin, membimbing siswa, memberi bekal materi pada siswa, melakukan monitoring dan melakukan evaluasi terhadap siswa yang melaksanakan prakerin. Masing – masing tugas tersebut sudah ditunjuk melalui SK kepala sekolah. Keberadaan SDM yang mendukung implementasi kebijakan program PSG sangat membantu kelancaran pelaksanaan implementasi kebijakan. Begitu juga Implementasi program PSG di SMKN 3 Pamekasan selain didukung oleh SDM sebagaimana dijelaskan diatas juga didukung oleh sarana prasarana pendidikan/fasilitas yang cukup memadai dalam bentuk sarana prasarana pembelajaran teori maupun praktek. Sarana prasarana pembelajaran teori bukan hanya disediakan ruang kelas yang presentatif namun juga fasilitas pembelajaran yang ditempatkan dikelas dalam bentuk CD proyektor dan fasilitas pembelajaran yang lain. Sarana pembelajaran praktek juga disiapkan oleh pihak manajemen sekolah dalam bentuk ruang bengkel/ruang praktek, ruang kegiatan unit produksi dan jasa juga ruang unit *teaching factory* sebagai bentuk pengembangan unit produksi dan jasa sekolah. Semua fasilitas tersebut baik fasilitas pembelajaran teori dan praktek disediakan sekolah dalam upaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang maksimal pada masyarakat. Fasilitas yang ada tersebut sebagai upaya memperlancar program-program sekolah diantaranya program Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Kelengkapan fasilitas/sarana prasarana pendidikan. Dari hasil wawancara dan dokumentasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi Program PSG didukung oleh fasilitas yang cukup dalam rangka mencapai hasil yang dikehendaki sesuai dengan tujuan implementasi kebijakan yang tertuang dalam kepmendikbud nomor 323/U/1997. Implementasi kebijakan ini memperkuat teori implementasi kebijakan George C. Edward. Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, selain variabel komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008 :151-152). Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: 1. Staf, 2. informasi, 3. wewenang dan 4. fasilitas.

Hasil penelitian tentang daya serap lulusan sekolah menengah kejuruan dalam penelitian ini tidak bisa digeneralisasi pada semua sekolah kejuruan namun hanya terjadi di SMKN 3 Pamekasan, sebagai sebuah studi kasus implementasi kebijakan program PSG dalam

meningkatkan daya serap lulusan. Daya serap lulusan merupakan salah satu indikator dari beberapa indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan produk layanan pendidikan di SMK. Daya serap lulusan berkaitan erat dengan kualitas lulusan, kebutuhan tenaga kerja, relevansi antara kompetensi lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini tidak membahas tentang variabel-variabel yang mempengaruhi daya serap sebagaimana yang dilakukan pada penelitian kuantitatif namun yang ingin diketahui adalah apakah kebijakan program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang merupakan kebijakan “*link and match*” sebuah strategi yang ingin menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri ini dapat meningkatkan daya serap siswa. Dengan implementasi kebijakan yang benar sesuai dengan kebijakan yang tertuang pada kepmendikbud nomor 323/U/1997, adanya kepatuhan pihak implementator terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam menjalankan implementasi kebijakan akan berdampak pada lancarnya proses implementasi tanpa ada masalah. Kelancaran dalam proses ini diharapkan terjadi peningkatan daya serap siswa. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan Ripley dan Frankin bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan implementator dalam mengimplementasikan kebijakan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga, dan hasil program yang sesuai dengan rencana dari program.

5. Temuan Penting , Implikasi Penelitian dan Proposisi

5.1. Implementasi kebijakan PSG berbasis *teaching factory*

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan di dua tempat yakni di sekolah (SMK) dan di Industri (DU/DI). PSG merupakan sistem pembelajaran yang wajib dijalankan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sistem Pembelajaran ini merupakan bentuk pembelajaran yang dianggap dapat menyelesaikan masalah yang terjadi antara sekolah kejuruan selaku pemasok/penyedia tenaga kerja dengan pihak dunia kerja (DU/DI) yang memerlukan pasokan tenaga kerja. Jika sebelum diberlakukannya PSG kedua institusi ini dianggap saling berdiri sendiri, dimana pihak SMK merasa menghasilkan lulusan yang sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum yang dijadikan pedoman, namun pihak dunia kerja merasakan bahwa lulusan SMK tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan demikian harapan pihak SMK agar lulusannya segera terserap di DU/DI, namun pihak DU/DI sulit menerima lulusan SMK karena kompetensi lulusan SMK tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kondisi ini memerlukan solusi yang bisa mengakomodasi 2 (dua) kepentingan yakni kepentingan pihak SMK dan kepentingan pihak DU/DI, maka diberlakukanlah sistem pembelajaran “*dual system*” yang memiliki arti keterkaitan dan kesepadanan, terkait antara kompetensi siswa dengan kompetensi yang dibutuhkan DU/DI. *Dual system* ini lebih dikenal dengan nama PSG. Program ini pada dasarnya mengatur tentang kebutuhan kompetensi kejuruan seperti apa yang dikehendaki DU/DI pada lulusan SMK. Sarana dan prasarana/fasilitas pendidikan seperti apa pulakah yang harus disiapkan oleh pihak sekolah agar kompetensi lulusannya memenuhi keinginan pihak DU/DI. Untuk melaksanakan program tersebut diperlukan payung hukum, landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan program PSG tersebut yakni tertuang dalam peraturan pemerintah melalui kepmendikbud nomor 323/U/1997 yang didalamnya memuat kebijakan kemitraan SMK dan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) dalam rangka praktik industri. Kebijakan yang tertuang dalam kepmendikbud tersebut hingga kini tetap berlangsung sejak diterapkannya aturan tersebut pada program PSG tahun ajaran 1997/1998 walaupun telah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi termasuk pengelolaan pendidikan. Kebijakan program PSG dilaksanakan melalui kerjasama yang pada dasarnya melibatkan tiga komponen penting yaitu pihak Majelis Sekolah (MS), pihak Dunia Usaha/Dunia industri (DUDI) yang akan memakai siswa dan pihak sekolah menengah kejuruan (SMK). Ketiga institusi itulah yang melaksanakan kemitraan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui mekanisme program PSG .

Temuan penting :

Jika melihat isi kepmendikbud nomor 323/U/1997 yang mengatur penyelenggaraan PSG dimana didalamnya juga mengatur kebijakan kemitraan SMK dan IP (DU/DI) yang melibatkan 3 komponen penting yakni Majelis Sekolah (MS), IP (industri Pasangan) dan pihak SMK yang tercantum dalam bab III pasal 3 pasal 4, pasal 6 dan pasal 7. Bab III pasal 3 mengatakan bahwa “ setiap SMK berkewajiban menyelenggarakan program PSG bersama dengan IP yang memenuhi syarat”, sedang pasal 4 ayat 4 mengatakan “ untuk menyelenggarakan PSG, SMK harus memiliki MS dan IP “. Pasal 6 pada kepmendikbud tersebut mengatakan “ penunjukan IP yang memenuhi persyaratan ikut serta dalam pelaksanaan PSG dilakukan bersama oleh SMK dan MS”, sedang pada pasal 7 dikatakan “PSG diselenggarakan di IP dan tempat lain yang ditentukan oleh SMK dan MS“. Penjelasan pasal-pasal diatas jelas mengandung arti betapa pentingnya peran MS dalam mengimplementasikan kebijakan program PSG. Dari temuan dilapangan sejak berlakunya program PSG tahun ajaran 1993/1994 di SMKN 3 Pamekasan sampai tahun ajaran 2017/2018 belum pernah memiliki MS yang seharusnya dibentuk diawal pelaksanaan program PSG. Fungsi MS lainnya dalam penyelenggaraan program PSG adalah bahwa MS bertanggung jawab terhadap penilaian keahlian kompetensi siswa sebagaimana dijelaskan pada bab IX pasal 24 ayat 3 yang menyatakan “Penilaian penguasaan keahlian kompetensi menjadi tanggung jawab MS“, Peran penting MS dalam penyelenggaran kebijakan PSG juga ditunjukkan pada bab XI pasal 29 ayat 3 tentang pengawasan yang menyatakan “ Pengawasan PSG pada SMK dan IP menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan MS.

Dengan tidak adanya MS selama ini implementasi PSG di SMKN 3 tetap berjalan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan PSG mulai dari proses, pelaksanaan sampai pada tahap akhir dalam bentuk Uji sertifikasi. Namun demikian implementasi tersebut berjalan sekedar memenuhi tuntutan kurikulum tanpa memikirkan kualitas IP yang dijadikan mitra, dengan demikian kompetensi kejuruan profesional yang diharapkan didapatkan dari IP tidak dapat diwujudkan Siswa merasa lebih memiliki kompetensi yang didapatkan dari sekolah dibandingkan dengan kompetensi yang didapatkan dari DU/DI .

Temuan ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan Replay dan Franklin bahwa implementasi kebijakan tidak akan membawa hasil jika ada ketidak patuhan implementator dalam mengimplementasikan kebijakan. Tidak terbentuknya MS menunjukkan ketidak patuhan pihak SMKN 3 Pamekasan dan ketidak patuhan ini berimplikasi pada hasil yang didapat dalam implementasi kebijakan tidak optimal.

5.1.1 Tingkat penyerapan lulusan melalui implementasi PSG berbasis *teaching factory*

Implementasi PSG berbasis *teaching factory* di SMKN 3 Pamekasan dilakukan dengan memperhatikan rambu-rambu penyelenggaraan PSG yang Tingkat penyerapan lulusan melalui implementasi PSG berbasis *teaching factory*

Implementasi PSG berbasis *teaching factory* di SMKN 3 Pamekasan dilakukan dengan memperhatikan rambu-rambu penyelenggaraan PSG yang tertuang dalam aturan kepmendikbud nomor 323/U/1987. Salah satu Tujuan kebijakan PSG yang tertuang dalam kepmendikbud nomor 323/U/1997 pasal 2 adalah “ Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan melalui peran serta IP (Industri Pasangan) ;

Temuan penting :

Dalam implementasi program PSG di SMKN 3 Pamekasan, Semua proses dijalani kan dari tahap ke tahap mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi yang dijalankan dengan dukungan Industri Pasangan (IP) namun data temuan tingkat keserapan sangat rendah. Siswa lebih banyak melanjutkan studi dibandingkan bekerja di DU/DI. Tujuan Implementasi kebijakan PSG yang tercantum dalam salah satu pasal kepmendikbud no 323/U/1997 pasal 2 sebagaimana disebut di atas sebenarnya membuka jalan untuk terserapnya lulusan SMK melalui pelaksanaan PSG. Kenyataan dilapangan banyak siswa yang enggan untuk bekerja di DU/DI yang dijadikan kemitraan, walaupun ada tawaran dari pihak DU/DI

untuk bekerja pada instansinya. Keengganan tersebut sebagai akibat para siswa merasa kurang cocok dan tidak menarik untuk bekerja di tempat dia melakukan prakerin. Hal ini merupakan salah satu bentuk kegagalan dari implementasi kebijakan karena tidak memenuhi hasil yang diharapkan, salah satu penyebabnya karena IP yang dijadikan pasangan rata-rata kurang terstandar. Hal ini sebagai akibat tidak adanya MS yang ikut melakukan seleksi penunjukan IP yang pantas untuk dijadikan tempat prakerin. Dengan demikian walaupun terjadi kelancaran dalam proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi namun tidak menjamin keberhasilan dari tujuan yang dikehendaki. Temuan diatas memperkuat teori kebijakan menurut Replay dan Franklin sebagaimana teori berikut berikut ini :

Teori Ripley dan Franklin bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditinjau dari perspektif proses implementasi dan hasil implementasi. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Hasil temuan diperoleh bahwa proses implementasi di SMKN 3 Pamekasan berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan namun tidak memberikan hasil dengan tidak terserapnya lulusan SMKN 3 Pamekasan sesuai harapan yang dikehendaki.

5.1.2 Dukungan SDM dan fasilitas/sarana prasarana

Implementasi kebijakan PSG berbasis *teaching factory* di SMKN 3 Pamekasan didukung cukup oleh SDM baik dari internal sekolah maupun dari eksternal sekolah demi keberhasilan program PSG. SDM yang mendukung dari internal sekolah tersebut selain berasal pimpinan dan dari staf pimpinan juga berasal dari guru dan karyawan, baik karyawan administrasi maupun karyawan dari unit-unit produksi maupun *teaching factory*. Mereka bekerja diatur melalui kewenangan yang didasarkan pada struktur organisasi kelembagaan yang ada dan pembagian tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Komunikasi antara pimpinan, staf pimpinan dan seluruh staf yang bertugas senantiasa terjalin dengan lancar. Demikian juga dengan dukungan sarana prasarana/fasilitas yang menggunakan kegiatan *teaching factory* untuk tempat berlatih siswa dan membekali kompetensi dasar sebagaimana ketentuan penyelenggaraan PSG. Dimana dalam ketentuan penyelenggaraan PSG yang diatur dalam kepmendikbud nomor 323/U/1887 tersebut tugas sekolah memberikan teori kejuruan dan praktek dasar kejuruan sedang tugas DU/DI pada kegiatan prakerin memberikan kompetensi profesional, etos kerja dan kedisiplinan. Dukungan juga diberikan oleh lembaga yang dibentuk oleh sekolah yakni melalui BKK (Biro Kerja Khusus) yang mendapatkan pengakuan dari propinsi Jawa Timur. Dimana tugas BKK adalah memasarkan siswa ke dunia kerja (DU/DI). Dukungan SDM dan sarana prasarana/fasilitas yang relatif cukup baik ternyata tidak menjamin keberhasilan implementasi program PSG dengan ketersediaan lulusan SMK pada dunia kerja, namun dukungan tersebut dapat memberi dampak pada kelancaran proses implementasi kebijakan. Hal ini juga memperkuat Teori Implementasi Kebijakan George Edward III bahwa dukungan Sumber daya, Fasilitas, Pemberian kewenangan sesuai dengan tupoksi dan komunikasi yang intens dilakukan akan membawa dampak pada kelancaran proses implementasi kebijakan

Temuan penting :

Implementasi program PSG yang didukung oleh SDM yang bermutu (memenuhi standar tendik) dan sarana prasarana yang memenuhi standar sarana prasarana pendidikan dari 8 standar kompetensi, dengan tujuan dihasilkannya lulusan yang memiliki kompetensi profesional sebagaimana keinginan industri agar industri siap menampung mereka menjadi tenaga kerja pada institusinya tidak akan membawa hasil jika pemerintah masih membuka peluang kebijakan yang memberi kesempatan siswa untuk melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 15 UU sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Kebijakan ini

diturunkan dalam peraturan pemerintah sebagaimana kepmendikbud nomor 323/U/1997 pasal 2 bahwa tidak ada satupun tujuan PSG yang mewajibkan lulusan SMK untuk bekerja. Kebijakan ini memberikan pilihan antara bekerja dan melanjutkan. Hasil penelitian ditemukan bahwa siswa SMKN 3 Pamekasan lebih banyak melanjutkan studi daripada bekerja .

5.2 Implikasi penelitian

a. Implikasi teoritis

Implikasi teoritis hasil penelitian implementasi Kebijakan menunjukkan bahwa :

- 1) Hasil penelitian memperkuat teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin, bahwa ketidak patuhan implementator dalam mengimplementasikan kebijakan akan berdampak pada keberhasilan dari tujuan yang dikehendaki
- 2) Hasil penelitian juga memperkuat teori implementasi Replay dan Franklin bahwa keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan. Pada perspektif hasil program dikatakan berhasil jika program membawa dampak seperti yang diinginkan pelaksana agen pelaksana. Suatu program bisa jadi berhasil dari sisi proses namun bisa jadi gagal bila dilihat dari sisi dampak yang dihasilkan, begitu pula sebaliknya.
- 3) Hasil penelitian juga menguatkan teori implementasi kebijakan George Edward III bahwa implementasi kebijakan yang didukung oleh sumber daya, fasilitas, pemberian kewenangan pada staf sesuai tupoksi dan komunikasi yang intens dilakukan akan membawa dampak kelancaran proses implementasi kebijakan

b. Implikasi praktis

Implementasi kebijakan PSG di SMKN 3 Pamekasan yang ditujukan pada siswa untuk bekerja di DU/DI tidak akan pernah membawa hasil jika siswa masih diberi pilihan antara bekerja dan melanjutkan studi. Apalagi jika IP yang dijadikan mitra tidak memberikan jaminan masa depan lebih baik jika siswa harus bekerja pada institusinya.

5.3 Proposisi

Hasil penelitian implementasi kebijakan PSG berbasis *teaching factory* di SMKN 3 Pamekasan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan akan memberikan hasil sesuai dengan tujuan kebijakan jika implementator mengimplementasikan kebijakan dengan memenuhi asas kepatuhan sebagaimana aturan dan petunjuk yang ditetapkan dalam kebijakan.
2. Keberhasilan Implementasi kebijakan dapat ditinjau dari perspektif proses dan hasil. Keberhasilan dari sisi proses bisa jadi kegagalan dari sisi hasil, Begitu pula keberhasilan dari sisi hasil yang dikehendaki bisa jadi kegagalan dari sisi proses
3. Kebijakan implementasi yang didukung oleh SDM dan fasilitas/sarana prasarana yang memenuhi standar, pemberian kewenangan pada staf yang sesuai dengan tupoksi akan memberikan kelancaran dalam proses namun belum memberikan jaminan keberhasilan jika tidak didukung oleh kebijakan lain yang memberikan dukungan penguatan pada kebijakan yang dikehendaki

6. Kesimpulan dan saran

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan penelitian bahwa dalam Implementasi kebijakan Pendidikan Sistem Ganda berbasis *Teaching Factory* dalam meningkatkan daya serap lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dapat disimpulkan bahwa ;

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda berbasis *teaching factory* di SMKN 3 Pamekasan tidak sepenuhnya dijalankan sebagaimana kebijakan yang tertuang dalam pedoman PSG dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang Merujuk pada

kependikbud RI nomor 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan PSG pada SMK, dengan tidak terbentuknya Majelis Sekolah (MS) yang memiliki peran sangat penting dalam keberhasilan penyelenggaraan PSG, hal ini juga tidak sejalan dengan kebijakan bersama antara mendikbud dan ketua umum Kadin yang tertuang dalam kependikbud nomor 0267a/U/1994 dan nomor 84/KU/X/1994 tanggal 17 Oktober 1994 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tingkat Pusat disebut Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN), Tingkat Wilayah disebut Majelis Pendidikan Kejuruan Provinsi (MPKP), dan Tingkat Sekolah disebut Majelis Sekolah (MS). Namun dari sisi proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi telah berjalan sesuai dengan tahapan yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam kebijakan kependikbud nomor 323/U/1997.

2. Daya Serap lulusan SMKN 3 Pamekasan untuk bekerja di DU/DI lebih rendah dibandingkan dengan lulusan yang melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi salah satu penyebabnya adalah DU/DI tempat dilakukannya prakerin tidak melalui pilihan DU/DI yang sesuai dengan yang diharapkan SMK dengan tidak terbentuknya MS dimana salah satu tugasnya adalah menentukan IP (DU/DI) yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan siswa, Pihak SMK dengan DU/DI tidak melakukan sinkronisasi kurikulum untuk mendapatkan kesesuaian antara kompetensi siswa dan kompetensi yang dibutuhkan DU//DI. Akibatnya siswa tidak tertarik untuk bekerja di tempat mereka prakerin walaupun ada tawaran untuk bekerja di tempatnya prakerin.

3. Dukungan Sumber Daya Manusia, sarana dan Prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan PSG cukup baik dengan adanya dukungan SDM baik yang berasal dari internal sekolah maupun eksternal sekolah Dukungan SDM dari internal sekolah diperoleh dari; (a) kepala sekolah, (b) seluruh staf pimpinan, (c) Ketua program keahlian, (d) Ketua – ketua UPJ sekolah, organisasi BKK (Biro Kerja Khusus) dan (e) guru – guru yang ditunjuk sesuai dengan SK yang dibuat oleh kepala sekolah. Kepanitian prakerin tertuang melalui SK kepala sekolah, dilengkapi dengan pembagian tugas yang jelas, secara lengkap tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan prakerin. Dukungan eksternal sekolah adalah; (a) orang tua siswa ,(b) komite sekolah, (c) stakeholder, (d) pimpinan DU/DI yang menjadi Industri Pasangan (IP) SMKN 3 Pamekasan. Dukungan Sarana prasarana diberikan dengan tersedianya, ruang belajar teori yang cukup representatif, unit – unit UPJ dan sarana pembelajaran *teaching factory* .

6.2 Saran

1. Saran untuk SMKN 3

- a. Promosi lulusan yang menggunakan implementasi program kegiatan sebagai sarana promosi lulusan, seharusnya memperhatikan dan mematuhi kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan dengan memperhatikan item-item kebijakan yang dibuat.
- b. Kegiatan PSG berbasis *teaching factory* akan membawa hasil optimal jika diimplementasikan dengan benar. serta melakukan azas kepatuhan terhadap isi kebijakan, MS wajib dibentuk sebagai institusi yang akan membantu kerjasama dengan DU/DI sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal pada kependikbud nomor 323/U/1997.

2 Saran untuk Pihak Industri /DU/DI

- a. Kerja sama kemitraan dengan SMK seharusnya benar-benar dipahami sebagai bentuk peran serta dalam meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah kejuruan yang menjadi mitranya
- b. Kerja sama kemitraan dengan pihak SMK diupayakan sama – sama membawa keuntungan dengan konsep simbiosis mutualis

3 Saran untuk Pemerintah

- a. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebaiknya disertai dengan reward dan punishment melalui kebijakan lain yang bersifat mendukung /memperkuat kebijakan yang berhubungan dengan program PSG agar kebijakan tersebut dipatuhi dan diimplementasikan sesuai dengan sasaran kebijakan dan membawa hasil guna bagi pelaksanaan kebijakan .
- b. Kebijakan PSG yang melibatkan beberapa pihak pelaksana kebijakan perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut diimplementasikan dengan benar dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang dibuat
- c. Jika kebijakan program PSG dibuat dengan tujuan agar lulusan sekolah kejuruan disiapkan untuk bekerja maka seharusnya ada kebijakan lain yang dibuat yang tidak memberi peluang bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.